

# MENGGALI KEMBALI POTENSI DAN BUDAYA DESA SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

**Mohammad Satori\***

*Abstrak*

*Krisis ekonomi membawa hikmah pada kita untuk mendefinisikan ulang bagaimana hakekat pembangunan yang seharusnya dilakukan. Apabila tujuan pembangunan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat maka seyogyanyalah masyarakat dilibatkan untuk menentukan arah dan kebijaksanaan salam program pembangunan tersebut. Untuk itu maka muncul istilah proses pembangunan yang dimulai dari bawah (bottom-up). Pembangunan dari bawah ini bisa memberikan pengertian : (a) proses pelibatangannya, dan (b) penggalian potensi yang ada di masyarakat. Di Indonesia level bawah ini identik dengan perdesaan. Oleh karena itu dalam upaya membangun dari bawah maka selain melibatkan masyarakat perdesaan juga mengkaji potensi-potensi yang ada di masyarakat desa tersebut.*

*Kata kunci : Potensi Masyarakat, Pelibatan Masyarakat*

## **1 Pendahuluan**

Di negara berkembang seperti di Indonesia ungkapan-ungkapan yang mengandung kata pembangunan sering dikemukakan. Bukan berarti di negara-negara yang sudah maju tidak ada pembangunan, akan tetapi ungkapan-ungkapan tadi seolah-olah hanya ada di negara-negara berkembang, yang dalam hal ini sering disebut sebagai negara dunia ketiga. Negara-negara berkembang seolah-olah dihadapkan pada dua pilihan model pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi yang beraliran faham kapitalis dan pembangunan ekonomi yang beraliran faham sosialis. Namun dari dua jenis faham ini nampaknya yang paling kuat mempengaruhi negara-negara berkembang adalah faham kapitalis. Apalagi dengan adanya negara-negara penganut paham sosialis yang mengalami keruntuhan seperti Unisoviet, maka sering dijadikan gambaran bahwa model sosialis kurang bisa dikembangkan.

---

\* Mohamad Satori, Ir., adalah dosen Tetap pada Program Studi Teknik Industri Unisba & Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Pembangunan ITB  
*Menggali Kembali Potensi Dan Budaya Desa Sebagai Modal Dasar  
Pembangunan Nasional (Mohammad Satori)*

Di Indonesia sendiri kedua paham tersebut mempengaruhi para perencana pembangunan terutama bidang ekonomi. Satu paham mengatakan bahwa tujuan pembangunan adalah pertumbuhan, dan paham yang lainnya mengatakan tujuan pembangunan adalah pemerataan. Paham pertumbuhan sebenarnya identik dengan model kapitalis sedangkan paham pemerataan identik dengan sosialis. Di Indonesia sendiri model pembangunan yang digunakan nampaknya menganut paham pertumbuhan. Teori pembangunan yang menganut paham pertumbuhan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman pembangunan di negara-negara maju. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh para ekonom dunia seperti : Ahur Lewis (1954), Rostow (1956), Rovenstein-Rodan (1943), Hirscham (1958), Leibebstein (1957), Nurkse (1952), Mynt (1954), dan Bauer dan Yamey (1957).

Persoalannya adalah model pembangunan yang mana yang cocok untuk diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Pertanyaan ini sulit untuk dijawab termasuk oleh para ahli perencanaan pembangunan maupun para ahli ekonomi sekalipun. Apalagi setelah terjadinya krisis diberbagai negara termasuk di Indonesia yang sebenarnya tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para ahli pembangunan maupun para ahli ekonomi. Kejadian krisis ekonomi di Indonesia membuat para ahli ekonomi terhenyak dan membuat kita seakan-akan terbangun dari tidur. Bagaimana tidak, selam hampir 30 tahun kita selalu dinina-bobokan oleh ungkapan-ungkapan keberhasilan pembangunan, bahkan Presidennya pun digelar Bapak Pembangunan. Tidak ketinggalan, dari kalangan luar negeri termasuk dari Bank Dunia sering memuji keberhasilan pembangunan di Indonesia. Sedang terlenanya kita akibat pujian dan sanjungan seakan sedang mimpi dalam tidur maka kita terbangunkan oleh kejadian krisis ekonomi yang bahkan di Indonesia menjadi krisis multi-dimensi.

Krisis ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara berkembang tapi juga di negara-negara maju seperti Jepang. Hanya saja bahwa setiap negara beda intensitasnya sehingga ada yang cepat pulih kembali dan ada yang bahkan menyebabkan krisis multi dimensi. Indonesia termasuk dalam kondisi yang terakhir. Bahkan menurut Penulis saat ini Indonesia masih mengalami dampak yang paling buruk akibat krisis ekonomi karena dibarengi dengan krisis politik. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa negara lain cepat bangkit dari krisis sementara Indonesia makin terpuruk. Ironinya, negara-negara lain sedang berlomba mempersiapkan diri untuk memasuki era globalisasi yang akan dimulai pada tahun 2003 atau bahkan lebih dipercepat. Sementara itu Indonesia masih berkuat pada tarik-menarik antar elit politik yang tidak kunjung selesai.

Perdebatan seru sering dilontarkan mulai dari kalangan bawah seperti tukang becak sampai kalangan atas yang sering disebut elit politik, mulai yang tidak berpendidikan sampai para kaum intelektual dan profesional, menyangkut penyebab atau biang dari krisis ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa krisis ini disebabkan karena konsep pembangunan kita yang hanya mengejar pertumbuhan mengabaikan pemerataan. Ada juga yang berpendapat bahwa penyebab krisis ini adalah karena orientasi pembangunan kita tidak memprioritaskan pada bidang pendidikan sumber daya manusia sehingga SDM kita “tergantung” pada orang lain. Bahkan ada pendapat yang dikaitkan dengan unsur politik yaitu bahwa penyebab krisis di Indonesia karena Presiden RI ke 2 terlalu lama memimpin sehingga terjadi stagnasi.

Dalam konteks pembangunan global, pada tahun 1949 Presiden Amerika Serikat Harry S Truman mengemukakan tentang tujuan pembangunan sebagai berikut “... Negara-negara Selatan adalah negara-negara terbelakang (*underdeveloped countries*). Adalah tugas Amerika Serikat dan Eropa Barat untuk membaca pembangunan itu ke Selatan, karena pembangunan adalah universal dalam ruang (*space*) dan berkesinambungan dalam hal waktu (*durable in time*)”. Sepuluh tahun kemudian PBB mendeklarasikan usulan dekade pembangunan pertama (1960-1970) bahwa untuk mengatasi keterbelakangan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan akan tetapi juga perubahan (S.Djuweng, Kompas 1996).

Pemikiran diatas kemudian digugat oleh kelompok Green Peace sebuah kelompok pencinta lingkungan. Wolfgang Sach, Presiden Green Peace Jerman mengemukakan bahwa :” ... tidak benar dalam pembangunan itu dapat diuniversalkan dalam hal ruang dan berkesinambungan dalam skala waktu. Pembangunan yang menurut konsep PBB – sama dengan pertumbuhan dan perubahan, tidak lain adalah pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Dan modernisasi sinonim dengan Baratisasi” (S.Djuweng, Kompas 1996).

Pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan proses perubahan dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Nani Soedarsono (2000) mengemukakan bahwa pembangunan adalah merupakan sebuah proses sosial yang direncanakan. Dengan demikian maka pembangunan memiliki dua dimensi akibat dari adanya proses, yaitu pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan tersebut pada hakekatnya adalah pertumbuhan ekonomi, sementara perubahan menyangkut pada aspek sosial, budaya dan ekonomi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian maka pembangunan bukan saja meliputi aspek fisik akan tetapi juga mental spiritual.

Hanya masalahnya adalah apabila ukuran pembangunan menggunakan kriteria baik atau kurang baik lantas bagaimana ukuran baik dan siapa yang menentukan bahwa itu baik atau kurang baik. Demikian pula apabila ukuran pembangunan menggunakan tolok ukur pertumbuhan dan perubahan kriteria apa yang menentukan bahwa sesuatu sudah tumbuh atau belum, berubah atau belum dan siapa yang menentukan serta menilai itu semua. Pertanyaan ini akan terkait dengan pertanyaan berikutnya yaitu siapa dan apa yang harus dibangun, bagaimana cara membangunnya dan untuk siapa hasil pembangunan tersebut.

## **2 Krisis Ekonomi dan Reformasi Pembangunan**

Krisis ekonomi yang terjadi di penghujung abad 20 ini nampaknya selain membawa bencana juga membawa hikmah khususnya bagi bangsa Indonesia. Salah satu hikmah penting yang perlu disikapi adalah munculnya pemikiran terutama di kalangan para elit pembangunan tentang perlunya reformasi dan reorientasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat ketika krisis melanda Bangsa Indonesia maka kondisi perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan. Bisa dibayangkan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang sedemikian tajam, inflasi, yang kemudian mengakibatkan rontoknya sektor industri baik industri hulu sampai industri hilir, PHK dan pengangguran merajalela, seolah membuat kita semua tersentak. Hal ini kemudian para pengamat di negeri ini menyimpulkan bahwa ternyata pondamental ekonomi Indonesia masih rapuh.

Rapuhnya pondamental ekonomi Indonesia paling tidak disebabkan oleh tiga faktor disamping faktor-faktor lainnya. Kedua faktor tersebut adalah :

- (a) Karena roda perekonomian tidak dipegang oleh kebanyakan rakyat Indonesia, akan tetapi oleh kelompok konglomerat yang merupakan sebagian kecil “rakyat” Indonesia
- (b) Pembangunan tidak didasarkan pada kemampuan sumber daya sendiri sehingga ketergantungan pada sumberdaya impor cukup tinggi
- (c) Ketergantungan pembangunan pada utang luar negeri sangat tinggi.

Dua faktor (a) dan (b) paling tidak yang dapat kita segera ambil tindakan karena utang luar negeri yang saat ini sudah cukup tinggi kita masih belum tahu bagaimana penyelesaiannya dalam jangka pendek.

Faktor (a) sebenarnya merupakan upaya pembangunan ekonomi yang

dimulai dari bawah (*bottom-up*) bukan sebaliknya yang selama ini dilakukan yaitu *top-down*. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan pendekatan *top-down* maka pertama kali akan menikmati adalah kalangan elitnya dulu atau penguasa dulu (Wolfgang Sachs, 1996). Salah satu upaya pembangunan ekonomi dari bawah yaitu dengan memperhatikan kondisi, potensi dan keinginan-keinginan yang hendak dicapai oleh level bawah tersebut. Mengingat bahwa mayoritas wilayah Indonesia ini adalah perdesaan maka yang termasuk kelompok bawah ini identik dengan masyarakat perdesaan. Memang benar bahwa akibat modernisasi dan industrialisasi maka secara perlahan ciri perdesaan tersebut akan terkikis. Namun proses ini berjalan cukup lama. Sebaliknya mungkin juga ciri perdesaan ini akan mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota (Dawam Rahardjo, 1987).

Konsep pembangunan yang dimulai dari bawah sebenarnya sudah dilontarkan pada awal Orde Baru oleh Bintoro Tjokroamidjojo dan Emil Salim, yaitu dengan melibatkan kalangan pesantren. Namun lambat laun konsep tersebut terkikis dengan adanya gagasan-gagasan lainnya yang masuk ke dalam konsep GBHN. Sehingga yang terjadi saat ini bahwa pembangunan di Indonesia lebih cenderung bersifat *Top-down* yang dimulai dari penguasa, dan ini berjalan sudah cukup lama hampir 32 tahun. Sebenarnya kalau kita menyadari betul ungkapan-ungkapan yang sering dikumandangkan pada masa Orde Baru yaitu : “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, maka semestinya lah demikian dalam penyelenggaraan pembangunan. Hanya saja dalam kenyataannya ungkapan tadi hanya merupakan upaya untuk “menentramkan” hati rakyat, karena justru yang terjadi malah sebaliknya yaitu : “dari penguasa, oleh penguasa dan untuk penguasa”. Yang lebih parah lagi terkadang rakyatlah yang menjadi korban pembangunan sehingga semboyannya menjadi : “dari penguasa, oleh rakyat dan untuk penguasa”.

Era reformasi mengilhami lahirnya konsep pembangunan ekonomi bercirikan kerakyatan. Banyak sekali program-program yang diluncurkan pemerintah pada era reformasi ini berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Hanya saja bahwa program-program JPS (jaring pengaman sosial) yang sering kali bahkan menimbulkan konflik-konflik baru disamping ada juga manfaatnya. Program-Program tersebut sebenarnya belum menyentuh pada persoalan yang fundamental.

Dalam pemikiran jangka panjang yang menyangkut hal-hal yang fundamental pembangunan yang dimulai dari bawah seharusnya didasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, baik itu potensi sumberdaya alam, potensi budaya, bahkan mungkin potensi ilmu pengetahuan. Jangan lupa bahwa ilmu pengetahuan bukan saja dari buku-

buku teori akan tetapi juga dari rakyat (kata-kata mutiara Rendra : rakyat adalah sumber ilmu). Cernea (1988) juga melukiskan bagaimana proyek kacang tanah yang gagal Tanzania karena para perencana proyek tidak meluangkan waktu cukup untuk berdiskusi dengan masyarakat perdesaan dan mengabaikan kawasan yang diusulkan oleh masyarakat desa tersebut. Sering kali para pemikir yang telah lama menimba ilmu pada saat masuk ke perdesaan untuk membantu program pembangunan desa memaksakan konsep ilmunya untuk diterapkan di desa tersebut. Padahal, pada kenyataannya banyak hal yang tidak sesuai. Sering kali masyarakat desalah justru yang lebih tahu tentang ilmu dan teknologinya.

Sering kali juga para pemikir tadi pada saat masuk ke perdesaan tidak meleburkan diri ke dalam komunitas mereka sehingga orang seperti ini oleh Chambers (1983) disebut sebagai “orang luar” (outsider). Dalam prakteknya para pemikir dari “luar” tadi biasanya hanya melakukan kunjungan sesaat akan tetapi seolah-olah tahu semuanya tentang desa tersebut. Orang seperti ini oleh Michael M. Cernea (1988) disebut sebagai “turis pembangunan perdesaan”. Dari hasil kunjungan singkat tersebut kemudian membuat kesimpulan dan program perencanaan pembangunan desa tersebut. Pada akhirnya program tersebut kemudian gagal karena tidak melibatkan masyarakat desanya. Apabila masih menggunakan pola demikian maka pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan terwujud, dan rakyat tetap menjadi objek pembangunan.

### **3 Pergeseran-Pergeseran Masyarakat Perdesaan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat proses industrialisasi dan modernisasi maka kondisi perdesaan dan nilai-nilai di perdesaan terkadang telah mengalami pergeseran. Pergeseran-pergeseran tersebut selain disebabkan oleh kemudahan akses dari desa ke kota juga karena kemudahan terhadap akses informasi. Beberapa pergeseran yang sering terjadi adalah :

- (a) Seringkali masyarakat desa telah menjual lahan pertaniannya kepada pihak-pihak yang berasal dari “luar” dan kemudian mereka lebih memilih mencari pekerjaan baru di kota. Akibatnya maka lahan-lahan pertanian di perdesaan mengalami pergeseran menjadi perumahan-perumahan atau gedung-gedung pabrik.
- (b) Para petani di desa pada umumnya sangat tergantung pada pupuk-pupuk kimia padahal sebelumnya banyak menggunakan pupuk organik yang sebenarnya bisa dibuat sendiri. Pada akhirnya pada saat krisis ekonomi dimana harga pupuk naik maka banyak petani yang tidak dapat

- memproduksi pertaniannya.
- (c) Budaya gotong royong sudah semakin tergeser oleh nilai-nilai individualistis karena semula mungkin sering bertemu di ladang-ladang pertanian menjadi jarang bertemu karena sering pergi ke kota
  - (d) Pergeseran dari nilai-nilai tradisional menjadi modern. Kehidupan masyarakat perdesaan mulai berubah dengan meninggalkan adat dan ciri perdesaan yang dianggap kuno, dengan meniru dan menerima pengaruh kehidupan modern khususnya masyarakat perkotaan baik pengaruh baik maupun buruk.

#### **4 Potret Perdesaan di Indonesia**

Meskipun sejak tahun 1970 pemerintah Orde Baru sudah merencanakan berbagai program dan kebijaksanaan menyangkut pembangunan di perdesaan namun kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Jumlah penduduk miskin dan termiskin mayoritas masih berada di perdesaan, bahkan kondisi penduduk yang termiskin (*the absolut poor*) juga ada di perdesaan. Kondisi ini juga ditandai dengan perkembangan fisik dan mental mereka yang masih rendah. Hal ini disebabkan juga karena tingkat pendidikan mereka juga masih sangat rendah. Menurut data Biro Pusat Statistik bahwa penduduk perdesaan yang tidak sekolah dan tidak tamat SD mencapai 72,01% sementara itu penduduk kota 57,02%.

Dalam hal kemandirian sebuah desa mulai dari masyarakatnya hingga para pengurus desanya juga sangat memprihatinkan. Sumber utamanya adalah dari UU No. 5 tahun 1979 yang menyeragamkan seluruh desa di Indonesia. Hal inilah yang menjadi sumber pemerkosaan terhadap hak-hak desa dan masyarakat desa. Dalam hal pola kepemimpinan desa pun menjadi cenderung otoriter karena tidak adanya lembaga pengawas yang independen. Arah kebijakan pembangunan sangat tergantung pada arahan dari atas mulai dari Camat, Bupati dan seterusnya. Sarundajang (2000) mengemukakan bahwa dari UU No. 5 tahun 1979 menyebabkan paling tidak tiga hal : (1) Panjangnya rantai birokrasi dari atas ke bawah untuk merealisasikan berbagai program desa, (2) Usulan desa sering kali ditolak atasnya dan yang direalisasikan malah program-program dari instansi lain di atasnya, (3) Kebijakan dan proses pembangunan tidak terpadu.

#### **5 Pengalihan Potensi Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa**

*Mengali Kembali Potensi Dan Budaya Desa Sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional (Mohammad Satori)*

## **5.1 Pembangunan Desa : Menjadikan Desa Modern atau Desa Adat/Tradisional ?**

Seperti telah dikemukakan di awal bahwa pembangunan adalah merupakan proses perubahan sosial. Kemana perubahan yang dituju? Dalam teori-teori pembangunan yang bersumber dari barat diartikan bahwa perubahan tersebut menjadi masyarakat yang modern. Karena sumbernya yang berasal dari Barat maka proses modernisasi sering diartikan sebagai proses “Baratisasi”. Melihat pengertian tersebut seolah-olah proses pembangunan adalah perubahan sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (Suarsono, 1994).

Di Indonesia sebenarnya telah lama berkembang Desa-Desa Adat, seperti di Bali ada Desa Pekraman dan juga di daerah-daerah lainnya. Kemudian dalam hal menjaga keamanan di Bali terkenal dengan adat *pecalang-pecalang*. Namun desa adat ini tergeser oleh Desa Dinas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1979. “Dua puluh tahun lebih Desa Dinas di Bali sudah lahir. Kelahiran tersebut merupakan kepentingan sentralisasi kekuasaan pusat terhadap daerah yang menyebabkan para penguasa pusat sangat dominan pengaruhnya terhadap penguasa lokal di daerah (Ketut Rahyuda, Kompas 11 Desember 2000).

Dalam hal membangun perdesaan di Indonesia sekarang apakah menjadikan desa menjadi modern atau tetap mempertahankan desa adat atau tradisional. Menurut penulis seharusnya pembangunan desa dilakukan dengan cara merubah pola pikir masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan modern dengan tetap mempertahankan sosio-kultural tradisional. Sebagai contoh misalnya dalam bidang pangan, lumbung desa merupakan sisi tradisional yang perlu dipertahankan sebagai upaya untuk jaring pengaman sosial. Namun dalam hal pengelolaan disesuaikan dengan perkembangan teknologi modern sehingga tidak disimpan digudang tapi dibuat dalam bentuk Baitu Maal.

## **5.2 Sisi-Sisi Tradisional Yang Bisa Digali di Perdesaan**

Salah satu budaya asli rakyat Indonesia adalah sifat gotong royong. Budaya inilah yang sering digunakan oleh masyarakat desa dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum maupun pembangunan untuk kepentingan pribadi. Ditataran Sunda sendiri terdapat slogan : silih asah – silih asih – silih asuh. Ini menunjukkan betapa setiap individu tidak bisa melepaskan antar satu dengan lainnya, dan betapa pentingnya kebersamaan diantara setiap individu.

Namun dengan adanya pengaruh modernisasi yang cenderung kebarat-baratan kondisi ini semakin terkikis. Komponen-komponen masyarakat semakin individualis sehingga secara perlahan meninggalkan sifat-sifat sosial. Sering kita mendengar sekarang adanya kerusuhan dan tawuran antar desa, antar kampung, bahkan antar penduduk. Walaupun orang sering mengatakan bahwa hal tersebut sebagai akibat dari konflik horizontal, namun sebenarnya jangan lupa bahwa hal ini juga disebabkan karena faktor pergeseran nilai-nilai kehidupan sosial tadi.

Dalam hal pengamanan ekonomi rakyat di perdesaan dalam desa adat sebenarnya telah lama mengenal lumbung desa. Lumbung desa ini didirikan karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bertumpu pada usaha pertanian, dimana sektor ini masih tergantung pada iklim. Pada musim-musim yang kurang mendukung misalnya kemarau, terjadi bencana banjir, mewabahnya penyakit dan sebagainya yang kemudian hal ini menimbulkan kondisi rawan pangan, maka lumbung desa ini memegang peranan sangat penting.

Lumbung desa yang lahir kira-kira tahun 1902 merupakan sebuah gagasan yang datang dari seorang warga Belanda bernama Messman yang waktu itu menjabat sebagai Residen Cirebon. Pada saat itu lumbung desa dibina secara intensif oleh Denist voor Volkscreditwysen (Dinas Perkreditan Rakyat).

Pada masa orde Baru, keberadaan lumbung desa ini tergeser dengan adanya Badan Urusan Logistik (Bulog). Lahirnya bulog sebenarnya memiliki misi yang sama dengan lumbung desa, hanya saja lingkup kerja Bulog bukan desa per-desa namun secara nasional. Awal mulanya keberadaan Bulog ini cukup baik. Namun lama kelamaan institusi Bulog ini memunculkan bentuk-bentuk penyelewengan, sehingga misi bulog untuk membantu masyarakat yang mengalami rawan pangan tidak terwujud.

Era reformasi sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk menggali kembali budaya lumbung desa tersebut. Hanya saja dalam hal manajemen pengelolaan perlu disesuaikan dengan kondisi kehidupan modern seperti sekarang ini.

### **5.3 Melibatkan Masyarakat Desa Dalam Menggali Potensi Desa**

Untuk tidak mengulangi menjadi masyarakat desa sebagai obyek pembangunan dan sebaliknya menjadikan subjek pembangunan, maka masyarakat desa perlu dilibatkan dalam hal proses pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu maka peran fasilitator disini sangat penting. Fasilitator seharusnya dapat melebur ke dalam sosial ekonomi perdesaan,

tidak lagi berperan sebagai “wisatawan pembangunan desa”. Sebagai upaya tersebut maka Penulis mengutip sebuah upaya proses belajar terbalik (dari bawah seperti yang dikemukakan oleh Chambers (1983) sebagai berikut :

- (1) Duduk, bertanya dan mendengarkan; artinya peran fasilitator harus dengan kesabaran yang tinggi untuk mendengarkan segala menggali sebanyak-banyaknya informasi dari warga masyarakat perdesaan.
- (2) Belajar dari orang yang paling miskin; bahwa untuk mengetahui bagaimana kondisi yang diinginkan oleh masyarakat maka fasilitator harus mendengarkan berbagai keinginan dan pemahaman dari orang yang paling miskin di desa.
- (3) Mempelajari pengetahuan teknis dari pribumi asli; bahwa fasilitator tidak lagi memaksakan kehendak berdasarkan ilmunya sendiri namun harus banyak belajar dari warga masyarakat desa terutama warga masyarakat yang paling miskin.
- (4) Penelitian dan pengembangan (litbang) bersama; dari upaya penggalian tersebut maka kebijaksanaan fasilitator mengajak warga masyarakat untuk berperan dalam mengembangkan hal-hal yang perlu dikembangkan di desa.
- (5) Belajar sambil bekerja; atau learning by doing merupakan upaya yang efektif untuk saling melengkapi antara pengetahuan masyarakat perdesaan dengan pengetahuan modern yang direalisasikan dalam berbagai aktifitas di perdesaan.
- (6) Permainan simulasi; merupakan upaya yang efektif untuk menyebarluaskan pengetahuan baik di bawah ke atas maupun dari atas ke bawah.

## **6 Program-Program Pembangunan di Desa**

Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam pembangunan pedesaan di Indonesia adalah sebagai berikut :

### **a. Desa Sebagai Unit Agrobisnis**

Keberadaan desa pada masa Orde Baru hingga saat ini khususnya pulau Jawa mengalami perubahan secara drastis. Hal ini disebabkan karena fungsi perdesaan itu sendiri bukan sebagai daerah pertanian semata, melainkan desa sebagai sumber komersial. Berkembangnya pendidikan di perdesaan yang semula buta huruf atau hanya setingkat sekolah dasar menjadi lulusan sekolah menengah menjadikan desa kehilangan tenaga kerja

kaum muda yang bekerja di perkotaan sebagai buruh pabrik, buruh bangunan dan lain-lain yang menjanjikan kesejahteraan lebih baik sekalipun tidak seluruhnya tepat.

Kawasan perdesaan yang kekurangan tenaga kerja menjadikan lahan pertanian terbengkalai sehingga lahan tersebut disewakan dan dijual kepada orang-orang kota. Sementara itu terjadi perubahan komoditas pada daerah tertentu, seperti kawasan perdesaan daratan rendah yang dekat perkotaan, mengalihkan usaha penanaman padi ke penanaman tebu yang lebih menguntungkan dan sedikit menyerap tenaga kerja dan para petani beralih ke sektor lain. Kecenderungan seperti ini sangat merugikan karena rakyat Indonesia masih tergantung makanan pokok dari beras, sementara hasil produksi padi akan terus menurun dan akan mengalami ketergantungan impor beras. Pengembangan agrobisnis di perdesaan perlu dilaksanakan secepat mungkin dengan menjadikan lahan pertanian sebagai pabrik yang menghasilkan bahan pokok dan komoditas lain yang menunjang bagi peningkatan kehidupan perdesaan. Satu hal yang tidak boleh terlupakan baik oleh pemerintah sebagai penguasa maupun pengusaha adalah keunggulan pola pikir rakyat desa yang bersifat alamiah namun dapat diteliti dan dikembangkan seperti bibit unggul padi yang telah dilakukan turun menurun kemudian dilakukan penyempurnaan oleh para ahli pertanian sehingga diperoleh bibit unggul padi dengan waktu relatif singkat dari 6 bulan menjadi 3 bulan masa tanam hingga dipetik hasilnya.

### **b. Desa Sebagai Unit Agrowisata**

Sumberdaya alam serta kehidupan di perdesaan memberikan daya tarik bagi para pendatang, dan merupakan usaha yang cukup menguntungkan sebagai devisa bagi negara dan daerah setempat. Keindahan dan ciri perdesaan telah lama dimonopoli dan dirusak oleh pihak-pihak yang memiliki modal yakni para penguasa dan pengusaha. Rakyat desa perlu dibina dan diberi pelatihan sehingga menjadi Sumberdaya Manusia yang berkualitas, begitu pula dengan lingkungan perdesaan sebagai sumberdaya alam dikelola oleh pemerintah serta instansi terkait dengan manajemen modern yang menjadikan desa memiliki potensi sebagai industri pariwisata.

### **c. Desa Sebagai Sentra Industri Kecil/Home Industry**

Tujuan program ini adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Untuk mengatasi sempitnya lahan pertanian dan tidak adanya lahan, industri kecil cocok untuk dikembangkan di perdesaan. Dengan memiliki keterampilan dan tersedianya bahan baku alami yang melimpah masyarakat desa dapat membuat kerajinan untuk memperoleh penghasilan .

Kendala yang dihadapi adalah sumberdaya yang rendah, kualitas produk yang dihasilkan, modal, peralatan, serta desain dan pemasaran hasil kerajinan. Mereka perlu pembinaan pemerintah agar bangkit dan memiliki jiwa usaha untuk menghasilkan produksi berkualitas.

#### **d. Kerjasama Antar Desa**

Karena masing-masing desa punya kelebihan dan kekurangan khususnya dalam bidang sosial ekonomi, perlu dikembangkan dan dibina kerjasama antar desa tetangga baik dari kesempatan kerja (menggarap lahan bersama), perdagangan hasil bumi antar desa atau barter.

#### **e. Modernisasi Lumbung Desa**

Berfungsi sebagai jaring pengaman desa yang membantu mensejahterakan masyarakat desa. Lumbung desa telah lama dimanfaatkan masyarakat desa sejak satu abad yang lalu, pada masa penjajahan Belanda. Keberadaan lumbung desa di perdesaan selain menyimpan hasil panen berupa gabah beras, juga hasil palawija. Bagi rakyat desa yang hanya buruh tani dapat menyimpan hasil bumi diatur oleh pengurus lumbung desa pada daerah tersebut. Lumbung desa ini sangat membantu pada saat terjadi musim kemarau panjang, hama dan penyakit yang merusak tanaman, banjir dan sebagainya. Ketika Indonesia mampu berswasembada pangan keberadaan lumbung desa ini mulai dilupakan dan tidak difungsikan, sehingga mulai tahun 1997 terjadi rawan pangan hingga saat ini Indonesia masih mengimpor beras. Keberadaan lumbung desa perlu dibangkitkan kembali dan tiap panen rakyat desa mulai menyimpan hasil bumi sedikit demi sedikit.

#### **f. Mengaktifkan Organisasi-Organisasi Desa**

Bahwa pembangunan mulai dari bawah seharusnya masyarakat didorong untuk membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti himpunan petani, koperasi, dll.

### **7 Penutup**

1. Krisis ekonomi disamping musibah juga membawa hikmah bagi kita untuk melakukan reformasi dalam hal pelaksanaan pembangunan ekonomi, dalam hal tersebut maka diperlukan upaya memperkuat pondamental ekonomi yang didukung oleh masyarakat atau rakyat yaitu dengan cara membangun dari bawah ke atas.
2. Sebagai upaya untuk membangun berpolakan dari bawah keatas maka masyarakat perdesaan merupakan komponen utama untuk dilibatkan

- secara aktif dalam pembangunan nasional.
3. Dalam upaya pembangunan dari bawah tersebut maka dilakukan upaya untuk mengali potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut yang kemudian dijadikan modal dasar dalam pembangunan desa.
  4. Dalam hal pembangunan desa dari bawah tersebut maka peran fasilitator sangat penting untuk menjembantani antara pengetahuan tradisional dengan pengetahuan modern. Peran fasilitator tidak lagi sebagai “turis pembangunan desa” akan tetapi harus melebur dalam kehidupan sosial desa.
- 

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku Literatur**

- Alvin Y. So dan Suwarsono, 1994, "*Perubahan Sosial dan Pembangunan*", Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Arief, Sritua, Dr., 1998, "*Teori dan Kebijakan Pembangunan*", pengantar, Sri-Edi-Swasono. Jakarta : PT. Pustaka CIDESINDO,.
- Chambers, Robert, 1987, "*Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*", pengantar M. Dawam Raharjo. Jakarta : LP3ES.
- Collier, William L, at.al, 1996, "*Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Perdesaan di Jawa*", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, "*Pembangunan Untuk Rakyat*", Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, jakarta : PT. Pustaka CIDESINDO.
- M. Cernea, Michael (editor), 1988, "*Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan*", Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Perdesaan, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sanderson, Stephen K., 1993, "*Sosiologi Makro*", Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Jakarta : Rajawali.
- Sarundajang, S.H., 1999, "*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*", Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sen, Amartya, 199 "*Development As Freedom*", Oxford University Pres.
- Soedarsono, Nani, 2000 "*Pembangunan Berbasis Rakyat*" (Community Base Development), pengantar : Prof. Dr. Mubyarto, Jakarta : Yayasan Melati Bhakti Pertiwi.
- Soetrisno, Loekman, 1995, "*Menuju Masyarakat Partisipatif*", Yogyakarta : Kanisius,.

## **Berita dan Artikel Koran**

Perkuat Ekonomi Rakyat, Kompas Online, 17 Oktober 1996

- Mengkritisi Arus pembangunan, Suntingan dari buku “*Community for Participatory Social Management*” diedit oleh Wolfgang Sach, Kompas Online, 12 Mei 1996
- Pemerintah Akan Merevisi Mekanisme Perencanaan Pembangunan, Kompas Cyber Media, 25 Juli 2000
- Wawan Gunawan : *Menimbang Obyektifitas Pembangunan*, Kompas Online, 19 Januari 1998
- S. Djuweng : *Pembangunan dan Keadilan, Masihkah Relevan*, Kompas Online, 12 April 1996
- Sejak KTT *Pembangunan Sosial di Copenhagen Pembangunan Sosial Terancam Mundur*, Kompas CyberMedia, 26 Juni 2000
- Lambung Desa, Impina Residen Cirebon Seabad Silam, Kompas Online, 23 Juni 198
- Sudah waktunya Desa Adat Diberdayakan, Kompas CyberMedia, 11 Desember 2000
- Kemiskinan : Kesenjangan yang Melebar, Kompas Online, 17 Oktober 1996.